

IMPLIKASI KEBIJAKAN DONALD TRUMP TERHADAP KEDAULATAN SUKU MASYARAKAT ADAT TOHONO O'ODHAM

Oleh :

**NURAFIAH MUSTAFA, FATMA ZALSABILA, HENNY YUNITA, ANDI GUFRON
HERMANSYAH**

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

Tohono O'odham Indigenous peoples are indigenous people of the United States Sonoran desert are mostly located in the state of Arizona, United States of America and the state of Sonoran, Mexico. As a tribe indigenous peoples solidarity high and is in the border area the United States and Mexico, indigenous peoples have often migrated when will conduct spiritual ceremonies and other spiritual-along with Tohono O'odham Indigenous peoples. Therefore, the Tohono O'odham Indigenous peoples have to protect about the US President's policy is Donal Trump was the construction of the border wall the United States and Mexico is considered to interfere with the sovereignty of the Tohono O'odham Indigenous Peoples and also can disrupt their ancestral lands because The border wall will be built right on the Tohono O'odham's land. About to protection carried out against the policy, but there is no response or the possibility that the construction of the border wall will be canceled. If this policy continues, then fear will be worse impact on the environment and lifestyle of indigenous Tohono O'odham itself. Tohono O'odham are desperately needs the freedom to cross the border because of the Tohono O'odham indigenous peoples is very important to maintain the cultural aspects of their tribe, where they must gather together for to do ceremonial or their activities spiritual although far from their land

Keywords: *Tohono O'odham, United States, Mexico, the border fence.*

Abstrak

Masyarakat adat Tohono O'odham merupakan masyarakat asli Amerika Serikat di gurun Sonoran yang sebagian besar berada di negara bagian Arizona, Amerika Serikat dan negara bagian Sonoran, Meksiko. Sebagai masyarakat adat yang solidaritas sukunya tinggi dan berada di daerah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, masyarakat adat ini kerap kali melakukan imigrasi apabila akan melaksanakan upacara adat dan spiritual-spiritual lainnya bersama dengan seluruh masyarakat suku Tohono O'odham. Oleh karena itu, Masyarakat adat Tohono O'odham telah melakukan proteksi terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat dalam hal ini Donal Trump yaitu pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko dianggap dapat mengganggu

kedaulatan suku masyarakat Tohono O'odham dan juga dapat mengganggu lahan nenek moyang mereka karena tembok perbatasan tersebut akan di bangun tepat pada lahan masyarakat Tohono O'odham. Terkait dengan proteksi yang dilakukan terhadap kebijakan tersebut, tetapi belum ada respon atau kemungkinan bahwa pembangunan tembok perbatasan tersebut akan dibatalkan. Apabila kebijakan ini berlanjut, maka di takutkan akan lebih berdampak buruk lagi terhadap lingkungan dan gaya hidup masyarakat adat Tohono O'odham itu sendiri. Masyarakat Tohono O'odham sangat membutuhkan kebebasan untuk melintasi daerah perbatasan karena bagi masyarakat adat Tohono O'odham sangat penting untuk menjaga aspek budaya suku mereka, dimana mereka harus berkumpul satu sama lain uuntuk melaksanakan kegiatan seremonial atau kegiatan - kegiatan spiritual mereka meskipun jauh dari tanah air mereka.

Kata kunci : Tohono O'odham, Amerika Serikat, Meksiko, tembok perbatasan.

PENDAHULUAN

Masyarakat Adat Tohono O'odham merupakan Masyarakat perpecahan dari Masyarakat India yang sebagian besar orang masyarakat adat Tohono ini berasal dari orang Amerika Asli yang berada di negara bagian Arizona dan Sonora. Masyarakat adat Tohono O'odham ini dikenal sebagai orang pertama yang menemukan Benua Amerika dimana pada saat itu terjadi konflik dan bencana alam yang membuat mereka memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian tersebar di berbagai belahan Benua Amerika termasuk Amerika Serikat dan Mexico. Pada tahun 1846 - 1848 terjadi konflik Perang antara Amerika Serikat dan Mexico tentang Sengketa wilayah. Dimana Amerika serikat ingin menguasai California, New Mexico dan sebagian Mexico Utara yang kemudian memaksa Meksiko menjual wilayahnya kepada Amerika Serikat dan diakhiri dengan Perjanjian Guadalupe Hidalgo¹. Sebagai bentuk wilayah yang dikuasai Amerika Serikat kemudian membangun secara resmi tembok perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko sebagai bentuk pembatas terhadap kedua negara tersebut. Namun, hal ini tentunya berimbas pada kehidupan masyarakat adat Tohono yang akan merasa terganggu dan mempunyai lahan di antara Amerika serikat dan Meksiko.

Mengenai tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko hingga saat ini masih menuai kontroversi hingga Donald trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang melanjutkan pembangunan tembok perbatasan tersebut dengan ditandatanganinya keputusan mengenai pembangunan tembok

¹Public Broadcasting Service (PBS), http://www.pbs.org/kerawar/borderlands_on_the_eve.html diakses pada tanggal 20 mei 2017 pukul 17.53

perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Tujuan dari pembangunan tembok perbatasan ini bertujuan untuk menghalangi masuknya pencari suaka, mendeportasi pendatang ilegal dan imigran gelap ke Amerika Serikat². Amerika Serikat menganggap bahwa dengan adanya imigran Meksiko yang memasuki wilayah Amerika Serikat termasuk Masyarakat Adat Tohono yang berada di area Meksiko akan mengganggu keamanan nasional Amerika Serikat dan juga akan mengambil hak-hak pekerjaan bagi warga Amerika Serikat, namun sebenarnya imigrasi yang dilakukan tersebut hanya sebatas hubungan antar masyarakat Adat Tohono O'odham.

Tohono O'odham merupakan kelompok masyarakat adat yang kerap kali melakukan imigrasi dari Meksiko ke Amerika Serikat maupun sebaliknya hal ini dikarenakan wilayah Masyarakat Adat Tohono O'odham berada di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Dalam konteks globalisasi cultural proses Imigrasi atau perpindahan orang dari satu negara ke negara lain dikatakan sebagai *People Movement*. Globalisasi jika diartikan secara cultural maka globalisasi dianggap hadir dengan membawa dampak yang signifikan dalam proses Imigrasi baik dari segi kehidupan hingga ke tingkat keseharian. Dalam hal ini, Masyarakat Adat Tohono ini yang pada awalnya bebas melakukan perpindahan di lahan mereka sendiri yang berada pada perbatasan dua negara yakni Amerika Serikat dan Meksiko. Akan tetapi setelah diterapkannya kebijakan Trump berupa membangun tembok perbatasan, membuat sebagian besar masyarakat Adat Tohono merasa kebijakan Trump ini akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan mereka sebagai masyarakat adat yang sejak lama ada sebelum Amerika Serikat dan Meksiko terpisah dalam perbatasan negara.

Kebijakan Trump dengan membangun tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang dianggap akan menjadi pembatas bagi warga Meksiko ataupun masyarakat Adat Tohono yang berada di Meksiko tidak dapat memasuki area Amerika Serikat secara bebas. Amerika Serikat sebagai negara yang super power tentunya harus meningkatkan keamanannya. Salah satunya adalah adanya batasan warga Meksiko termasuk masyarakat Adat Tohono memasuki area Amerika Serikat berupa tembok pembatas yang saat ini dalam proses pembangunan. Akan tetapi, lain halnya pada masyarakat Adat Tohono O'odham yang melihat adanya pembangunan tembok tersebut akan berpengaruh pada segi kehidupan mereka. Untuk itu, pentingnya mengkaji kebijakan Donald Trump terhadap kedaulatan suku masyarakat Adat Tohono O'odham secara berkelanjutan di masa mendatang.

Terkait tulisan ini yang berjudul "Implikasi kebijakan Donald Trump terhadap kedaulatan suku masyarakat Adat Tohono O'odham". Beberapa peneliti

² Christian Torres, "Trump tandatangani perintah untuk tembok perbatasan Meksiko", Voaindonesia, <http://www.voaindonesia.com/a/trump-perintah-tembok-perbatasan-meksiko/3692824.html> , diakses pada tanggal 20 Mei pukul 16.00

sebelumnya telah membahas mengenai masyarakat adat Tohono O'odham dalam perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Tulisan pertama yaitu Jurnal yang ditulis oleh Peter Heidepriem dalam jurnalnya yang berjudul *The Tohono O'odham Nation and The United States-Mexico Border* dalam Vol. 4 : 107. Dimana dalam tulisan ini juga membahas sejarah singkat masyarakat adat Tohono O'odham dan dampaknya tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko terhadap masyarakat adat Tohono. Tulisan kedua berupa jurnal dari [Rachael Marchbanks](#) yang berjudul *The Borderline: Indigenous Communities on the International Frontier* Vol.26 No. 3. Dalam jurnal ini membahas tentang perbedaan status masyarakat adat dalam melintasi ranah perbatasan internasional antara Amerika Serikat dan Meksiko yakni masyarakat Tohono O'odham dan Mohawk.

Adapun perbedaan tulisan dari Peter Heidepriem dengan tulisan ini yakni dari segi pengaruh tembok perbatasan terhadap masyarakat Tohono O'odham dimana peneliti sebelumnya hanya membahas tentang adanya batas-batas keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Tohono yang tidak secara bebas melintasi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. lain halnya dalam tulisan kedua dari Rachel Marchbanks yang sekedar membahas perbedaan status masyarakat adat antara masyarakat adat Tohono O'odham dan Mohawk. Sedangkan Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan presiden Donald Trump terhadap kehidupan masyarakat adat Tohono O'odham saat ini. Melihat tulisan-tulisan sebelumnya mengenai kebijakan Donald Trump dan Komunitas adat di Amerika Serikat, maka kami mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kebijakan Donald Trump terhadap kedaulatan suku masyarakat adat Tohono O'odham.

Kerangka Konseptual

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah salah satu isu global yang sampai saat ini masih menarik perhatian dunia. Meningkatnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dibelahan dunia akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan penerapan hak asasi manusia masih minim dikalangan penduduk dunia. Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang telah melekat pada setiap individu dimana hak tersebut telah diperoleh sejak dilahirkan ke dunia. Hak-Hak ini berasal dari hasil pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat individu sebagai seorang manusia. Hal ini kemudian menjadikan kedudukan tiap-tiap individu adalah sama tingkatannya tanpa perlu melihat perbedaan seks, ras, agama, warna kulit, bahasa, kewarganegaraan, kekayaan serta kelahiran. Munculnya *Universal Declaration of Human Rights* adalah salah satu instrumen hukum yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang dibentuk sejak 1948 yang kemudian dijadikan sebagai pelindung hak-hak asasi manusia secara global³. Disamping itu deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB ini dituliskan bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. Dengan adanya deklarasi ini maka diharapkan hak-hak asasi manusia maupun kelompok diseluruh negara dapat terjamin. Ini menunjukkan bahwa seluruh dunia setuju pentingnya hak asasi manusia. Selain deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB, terdapat beberapa negara yang juga mengeluarkan kontrak perjanjian mengenai Hak Asasi Manusia. Misalnya, *Magna Charta 1215 dan Bill of Rights 1689* yang dikeluarkan oleh Inggris, di Amerika Serikat dibentuk *Virginia Bill of Rights 1776 dan Declaration of Independence 1776*, serta *African Charter on Human and People Rights* yang dibentuk oleh Afrika.

Berdasar pada banyaknya deklarasi maupun konvenan yang dikeluarkan oleh PBB dan beberapa negara di dunia berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, maka terdapat tiga generasi Hak-Hak Asasi Manusia. Pertama, pemahaman HAM yang tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 adalah pernyataan tentang HAM yang sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan tradisional barat, yang lahir dari sebuah kemenangan kelas menengah absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan untuk berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Kedua, pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia yang tertulis dalam *Convention on Civil and Political Rights* dan *Convention on Economics, Social, and Cultural Right* (1966) merupakan hasil dialektika antara ideologi Barat (Liberalisme) yang memfokuskan pada hak-hak politik dengan ideologi Timur (Komunisme) dimana ideologi ini menitikberatkan pada hak-hak ekonomi. Dalam hal ini terlihat bahwa adanya upaya-upaya untuk menyelaraskan antara hak individu yaitu hak sipil dan hak politik, dengan hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk menjalani kehidupan yang layak serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu dalam konvenan ini juga dicantumkan hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas sebagaimana yang dituliskan dalam kedua konvenan tersebut.

Meskipun telah ada perbedaan antara hak sipil dan hak politik dengan hak ekonomi dan hak sosial, namun hal ini masih tetap menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang apa-apa saja yang termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Negara-negara Barat beranggapan bahwa yang termasuk dalam pelanggaran HAM hanya menyangkut pada pelanggaran hak sipil dan hak politik saja. Terutama pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dan

³Ardiansyah, Darmawan Muhammad. 2012 HAM dalam konteks hubungan internasional dan indonesia http://www.academia.edu/24935865/HAM_DALAM_KONTEKS_HUBUNGAN_INTERNASIONAL_DAN_INDONESIA diakses pada 20 Mei 2017 14.03 WITA

kebebasan individu. Dilain pihak, negara-negara berkembang lebih mengutamakan pada hak-hak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Generasi selanjutnya yaitu pemahaman tentang *Declaration of Vienna* 1993 yang merupakan kompromi antara negara-negara Barat yang sudah maju dengan negara-negara berkembang. Hal yang kemudian menjadi baru dalam generasi ketiga ini yakni adanya pengenalan tentang hak atas pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konferensi Vienna ini telah disepakati perlunya pendekatan yang berimbang dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia⁴.

Deklarasi Universal yang dibentuk dengan maksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu berbagai hak dan kebebasan manusia maupun kelompok dirumuskan secara sangat luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Meskipun sifatnya tidak mengikat secara yuridis, namun Deklarasi ternyata mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang tiada taranya. Sebagai pedoman yang dijadikan oleh dunia internasional pada perlindungan hak asasi manusia, deklarasi menjadi acuan banyak negara dalam undang-undang dasar, undang-undang, serta putusan-putusan hakim⁵.

Kedaulatan Negara

Setelah berakhirnya Perang Dingin, ada satu hal yang menjadi sorotan dunia yakni keberadaan makna 'kedaulatan nasional' yang tertera dalam perjanjian Westphalia. Dalam perjanjian Westphalia dinyatakan bahwa dengan adanya kedaulatan, sebuah negara berhak untuk mengatur segala urusan dalam negerinya, termasuk yang berakaitan dengan perlakuan terhadapwaga negaranya. Suatu negara juga dilarang untuk ikut campur terhadap negara lain.

Tiap negara atau wilayah masing-masing memilik kedaulatan yang melekat padanya, hal ini kemudian menjadi sifat dan ciri hakiki dari suatu negara. Jika dikatakan bahwa suatu negara berdaulat, maka makna yang terkandung bahwa negara memiliki hak dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kedaulatan tentu menjadi sangat penting bagi suatu negara, karena selain untuk menjamin kekuasaannya juga untuk mencegah intervensi-intervensi dari negara lain. Berdasarkan sejarah, kedaulatan berasal dari bahasa inggris yang dikenal dengan *souvergnity* yang kemudian berakar dari bahasa latin *supranus* yang mempunyai pengertian "yang teratas"⁶.

⁴Yani, Mochammad yanyan. http://repository.unpad.ac.id/4378/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf diakses pada 20 Mei 2017 14.09 WITA

⁵Budiarjo, Miriam, 2013. "Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

⁶Anonim, "Kedaulatan Suatu Negara atas Zona Larangan Terbang" <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/Chapter%20II.pdf;jsessionid=67D109241D3E3218D0F55F6696616464?sequence=3> diakses pada 20 Mei 15.09 WITA

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu:

1. Aspek internal, yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.
2. Aspek eksteral, kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu⁷.

Ruang berlakunya kedaulatan ini terbatas pada wilayah negara tersebut, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur hanya dalam batasan wilayah negara tersebut. Suatu negara hanya dapat melaksanakan secara eksklusif dan penuh hanya pada batas teritorialnya. Adapun jika sudah diluar wilayahnya, maka suatu negara tidak lagi memiliki kedaulatan sebagaimana dalam batasan wilayahnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya. (1) kedaulatan hanya terbatas pada batasan wilayah suatu negara yang memiliki kedaulatan, (2) kedaulatan suatu negara tidak lagi berlaku jika telah melewati batas teritorial negara tersebut. Suatu negara tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yuridiksi eksklusif di luar wilayah negara tersebut yang mana hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan negara lain. Huala Adolf berpendapat bahwa kedaulatan teritorial berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusifnya⁸.

Sedangkan JG Starke, munculnya konsep kedaulatan teritorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yuridiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyempingkan negaranegara lain⁹. Kedaulatan wilayah atau teritorial ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif yang dimaksud adalah berkaitan dengan sifat hak eksklusif kompetensi suatu negara terhadap wilayahnya. Sedangkan aspek negatif kedaulatan teritorial ini adalah adanya kewajiban untuk tidak mengganggu hak negara negara lain.

Hukum internasional mengakui adanya kedaulatan tiap-tiap negara di dalam wilayahnya masing-masing. Kedaulatan tertinggi yang dipegang oleh negara menunjukkan bahwa pada satu wilayah hanya ada satu negara yang berdaulat dan tidak mungkin ada atau lebih negara yang berdaulat pada satu wilayah. Salah satu unsur yang terpenting suatu negara adalah wilayah. Dalam wilayah inilah suatu negara menjalankan segala aktifitasnya. Dengan demikian bahwa tidak mungkin ada negara tanpa adanya pemilikan atas suatu wilayah.

⁷Pathiana, wayan I, 1990 "Pengantar Hukum Internasional". Mandar Maju : Bandung

⁸Hamzah. H.Backtiar, Hamid Sulaiman, 1997 "Hukum Internasional" USU Press Medan : Medan

⁹Starke, JG, 1999 "Pengantar Ilmu Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh" Sinar Grafika : Jakarta

Dengan ini terlihat jelas bahwa kedaulatan teritorial adalah poin penting bagi suatu negara dalam menjalankan dan mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan negaranya. Adanya intervensi dari negara lain menandakan bahwa meski di era globalisasi sekarang ini, masing-masing negara harus memperhatikan kedaulatan negara lain. Karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kedaulatan adalah ciri hakiki bagi suatu negara.

PEMBAHASAN

Kebijakan Presiden Amerika Serikat dalam hal ini Donal Trump terkait pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, masyarakat adat Tohono O'odham sebagai komunitas masyarakat adat yang bermukim di daerah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko melihat pembangunan tembok perbatasan akan mengganggu wilayah mereka dan dapat mengganggu kedaulatan suku mereka termasuk saat melaksanakan kegiatan spriritual adat nenek moyang mereka sebagai masyarakat adat Tohono O'odham. Hal tersebut bisa dilihat letak pembangunan tembok perbatasan berada di sekitaran lahan milik Masyarakat adat Tohono O'odham sekitar 75 mill sepanjang perbatasan Amerika-meksiko¹⁰. Pembangunan tembok perbatasan secara berkelanjutan akan membawa dampak buruk terhadap masyarakat adat yang berada diwilayah perbatasan. Mulai dengan adanya pagar besi di perbatasan yang menjadi gangguan terhadap lahan mereka. Dengan adanya tembok pembatas itu juga akan lebih membawa dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi hingga merambat terhadap lingkungan dan gaya hidup masyarakat adat Tohono O'odham itu sendiri.

Masyarakat adat Tohono O'odham mengaggap pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksikotidak hanya akan mengganggu lahan mereka akan tetapi kehidupan mereka juga merasa tidak aman dengan munculnya militerisasi serta pencaplokan lahan masyarakat adat yang secara hukum akan melanggar hak ekonomi, politik, dan budaya yang ada pada masyarakat adat Tohono O'odham tersebut.

Kolonial Eropa telah mempengaruhi perbatasan negara Eropa seperti Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada yang dulunya tidak terdapat perbatasan negara, namun setelah kolonisasi Eropa, tanah suku yang berada di daerah Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada mulai di bagi terkait perbatasan negara, sehingga masyarakat adat terpotong atau terpisah dari tanah air tradisional mereka. Suku yang berada di daerah perbatasan internasional antara Amerika Serikat, meksiko dan Kanada harus menavigasi negara yang saling bertentangan, federal dan kebijakan internasional yang kadang mengganggu kedaulatan suku

¹⁰ Lucas Jackson, "*masyarakat adat tolak trump bangun tembok pembats*", Tempo dunia, <https://dunia.tempo.co/read/news/2017/01/29/116840874/masyarakat-adat-tolak-donald-trump-bangun-tembok-pembatas> , diakses pada 19 Mei 2017 pukul 21.59

mereka.

Perjanjian Guadalupe Hidalgo sebagai tanda berakhirnya perang Meksiko dan Amerika Serikat pada tahun 1948. Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko dipisahkan oleh suku Tohono O'odham. Pada perjanjian Guadalupe Hidalgo Amerika Serikat dan Meksiko tidak mengakui hak lintas suku apapun pada undang-undang federal berikutnya kecuali dengan kasus suku Tohono O'odham yang di beri kebebasan untuk lintas suku di daerah perbatasan karena relokasi sejarah dan imigrasi musiman, pada tahun 1983 kongres meloloskan suatu tindakan yang memungkinkan suku Tohono O'odham di Arizona Selatan dibebaskan untuk melintasi batas Amerika Serikat dan Meksiko seperti yang mereka lakukan selama berabad-abad sebelum pembentukan perbatasan asing¹¹.

Pada tahun 2002, Kongres Nasional Indian Amerika Serikat melaporkan terkait hal diabaikannya kebutuhan suku ketika telah dilakukan persetujuan Homeland Security Act of 2002 yang menyediakan dana untuk negara, akan tetapi tidak untuk suku-suku yang terdapat di negara masing-masing melainkan untuk langkah-langkah peningkatan keamanan perbatasan.¹² Departemen keamanan dalam negeri waktu itu gagal untuk konsultasi dengan suku-suku ketika mereka akan mengusulkan Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI) yang mengamanat bahwa semua warga negara Amerika Serikat harus memiliki paspor atau dokumen WHTI jika ingin diterima lagi untuk masuk kembali ke Amerika Serikat bagi mereka yang dari Kanada atau dari Meksiko.¹³

Meningkatkan upaya pengawasan di perbatasan negara seperti pembangunan pagar pada perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat telah sangat berdampak terhadap hubungan lintas-perbatasan suku masyarakat adat Tohono O'odham. Seperti yang telah kami tuliskan sebelumnya bahwa masyarakat adat Tohono O'odham kerap kali melakukan imigrasi ke Meksiko karena mereka bermukim di daerah perbatasan dan beberapa masyarakat adat Tohono O'odham berada di daerah Meksiko, sehingga apabila mereka ingin melakukan kegiatan spiritual, mereka harus berkumpul disuatu tempat untuk merayakan spiritual tersebut jadi mau tidak mau mereka harus melakukan imigrasi baik itu harus menjalani pemeriksaan dokumen sebagai imigran atau

¹¹Martin, H. (2010, Juli / Agustus). Sebuah Perbatasan Berjalan Melalui Ini: Mohawk Kedaulatan dan Negara Kanada. *Majalah Briarpatch*, Pp. 34, 36. Diakses di <http://briarpatchmagazine.com/articles/view/a-border-runs-through-it> pada 20 Mei 2017 15.44 WITA

¹²Loc cit

¹³McMullin, A. (2006,21 Juni). NCAI Wraps up Mid-tahun Konferensi; Resolusi perbatasan Disorot [Siaran Pers]. [http://www.ncai.org/NewsView.19.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[arc\]=1&tx_ttnews\[pL\]=2591999&tx_ttnews\[pS\]=1149138000&tx_ttnews\[tt_news\]=175&tx_ttnews\[backPid\]=18&Chash=4f38d5c464](http://www.ncai.org/NewsView.19.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[pS]=1149138000&tx_ttnews[tt_news]=175&tx_ttnews[backPid]=18&Chash=4f38d5c464) diakses pada 20 Mei 2017 20.47 WITA.

mereka melewati pagar perbatasan secara sembunyi - sembunyi .

Dalam waktu kurang lebih tiga decade terakhir, kehidupan Suku telah menjadi sangat sulit. Masyarakat Adat Tohono O'odham di Meksiko dan Amerika Serikat merasa sangat ditantang mempertahankan control untuk bebas bergerak diatas tanah mereka. Secara khusus, perjuangan masyarakat adat Tohono O'odham untuk menyeberangi daerah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, yang mereka telah lakukan sampai beberapa decade yang lalu. Pencegahan terhadap masyarakat Tohono O'odham untuk bebas melewati daerah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko menghambat kegiatan mereka untuk berlatih upacara keagamaan, mengumpulkan makanan, mengunjungi keluarga, menerima perawatan kesehatan, dan melaksanakan migrasi yang berhubungan dengan ekonomi mereka. Hal ini terkait dengan terganggunya kedaulatan suku masyarakat adat Tohono O'odham itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan bahwa masyarakat Tohono O'odham memang tidak ingin dipisahkan dengan saudara mereka yang berada di daerah Meksiko karena mereka satu komunitas yaitu masyarakat adat Tohono O'odham dimana mereka harus melakukan serangkaian upacara spiritual mereka bersama - sama dengan seluruh masyarakat adat Tohono O'odham baik itu yang berada di daerah Meksiko maupun yang berada di Amerika Serikat itu sendiri.

Perjalanan lintas batas antara sisi Amerika Serikat dan Meksiko menurut masyarakat adat Tohono O'odham sangat penting bagi anggota suku mereka. Terkait dengan keanggotaan suku masyarakat adat Tohono O' odham di tentukan oleh konstitusi masyarakat Tohono O'odham sendiri, namun terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi perumahan, dan program pelatihan kerja di tentukan dan di tanggung oleh Amerika Serikat sama meskipun apabila ada keturunan masyarakat adat Tohono O'odham yang melahirkan keturunannya dan menetap di daerah Meksiko, mereka tetaplah anggota dari masyarakat adat Tohono O'odham yang diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Oleh karena itu jika melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anggota suku dari masyarakat adat Tohono O'odham yang merupakan warganegara Meksiko berhak atas manfaat yang diberikan untuk suku federal terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi perumahan, dan program pelatihan kerja dan mereka harus bebas untuk memasuki reservasi masyarakat adat Tohono O'odham di Amerika Serikat untuk memanfaatkan Program tersebut.

Terkait dengan kedaulatan suku dan budaya masyarakat adat Tohono O' odham, mereka sangat membutuhkan kebebasan untuk melintasi daerah perbatasan karena bagi masyarakat adat Tohono O'odham sangat penting untuk menjaga aspek budaya Tohono O'odham dimana mereka harus berkumpul satu sama lin sekalipun jauh dari tanah air mereka. Sebagai contoh sebuah ritual tahunan untuk beberapa masyarakat adat Tohono O'odham memerlukan ziarah

ke Magdalena, Meksiko untuk berdoa dan meditasi. Selain itu, barang – barang termasuk bulu burung, daun pinus, dan rumput diambil di daerah Meksiko untuk keperluan ritual agama dan budaya. Yang paling penting adalah memerlukan bantuan untuk mengangkut bahan-bahan tersebut untuk di bawa ke daerah masyarakat adat Tohono O’odham di Amerika Serikat. Serta banyak keluarga suku Tohono O’odham yang berada di Amerika Serikat yang memiliki kerabat di daerah Meksiko dan begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan kebebasan melahirkan keturunan di Meksiko beberapa dekade sebelumnya.

Terkait dengan hak asasi manusia masyarakat adat Tohono O’odham, awalnya sudah dipenuhi oleh pemerintah Amerika Serikat dengan adanya pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi perumahan, dan program pelatihan kerja. Namun setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang menggantikan Barrack Obama, kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Donald Trump yaitu dibangunnya tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, masyarakat adat Tohono O’odham merasa bahwa hak mereka terkait tanah nenek moyang mereka di rampas atau di aneksasi padahal tanah nenek moyang mereka ini merupakan satu bangsa yang telah ada selama beribu – ribu tahun yang lalu sebelum negara modern seperti Amerika Serikat dan Meksiko memetakan wilayah mereka pada abad ke – 19.

Masyarakat adat Tohono O’odham saat ini hanya memiliki satu pintu untuk bisa melintasi daerah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yaitu gerbang San Miguel sebagai transit dalam jarak yang munasabah. Apabila tembok perbatasan tetap akan dilanjut, maka mereka akan sulit untuk mengakses hubungan sosial dan budaya mereka dengan saudaranya yang berada di daerah Meksiko. Hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dan kebebasan individu terkait pembangunan sosial, dan budaya.

Masyarakat adat Tohono O’odham sebagai masyarakat adat yang solidaritas dalam sukunya sangat tinggi, tidak mengharapkan adanya pemisahan dengan suku mereka terkait dengan akan dibangunnya tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Oleh karena itu, masyarakat adat Tohono O’odham melakukan proteksi terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden baru Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump yang akan membangun tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang secara otomatis tanah mereka digunakan untuk membangun tembok tersebut dan juga mereka akan terpisahkan dengan saudaranya yang berada di daerah Meksiko. Mereka sangat mengharapkan adanya perubahan kebijakan Donald Trump dan mereka mengharapkan hak kebebasan dan hak terkait pembangunan sosial dan budaya mereka. Mereka juga mengharapkan kedaulatan suku mereka tetap terjaga dan mereka mampu melaksanakan upacara – upacara spiritua mereka

dengan khusyuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Darmawan Muhammad, 2012, *HAM dalam konteks hubungan internasional dan Indonesia*, diakses dari <http://www.academia.edu/24935865> **HAM DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INDONESIA** pada tanggal 20 Mei 2017 14.03 WITA
- Anonim, "Kedaulatan Suatu Negara atas Zona Larangan Terbang" di akses <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17789/Chapter%20II.pdf;jsessionid=67D109241D3E3218D0F55F6696616464?sequence=3> diakses pada 20 Mei 15.09 WITA
- Budiarjo Miriam, 2013. "Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Christian Torres, Trump tandatangani perintah untuk tembok perbatasan meksiko, Voa Indonesia, di akses dari <http://www.voaindonesia.com/a/trump-perintah-tembok-perbatasan-meksiko/3692824.html> , pada tanggal 20 mei pukul 16.00
- Hamzah. H.Backtiar, Hamid Sulaiman, 2997 "Hukum Internasional" USU Press Medan : Medan
- Lucas Jackson, masyarakat adat tolak trump bangun tembok pembatas, Tempodunia, di akses dari <https://dunia.tempo.co/read/news/2017/01/29/116840874/masyarakat-adat-tolak-donald-trump-bangun-tembok-pembatas> , pada 19 Mei 2017 pukul 21.59
- Pathiana wayan I, 1990"Pengantar Hukum Internasional". Mandar Maju : Bandung
- Public Broadcasting Service (PBS), US-MEXICO War (1846-1848), di akses dari http://www.pbs.org/kera/usmexicanwar/war/borderlands_on_the_eve.html, tanggal 20 mei 2017 pukul 17.53
- Starke JG, 1999 "Pengantar Ilmu Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh" Sinar Grafika : Jakarta
- Martin H. (2010, Juli / Agustus). Sebuah Perbatasan Berjalan Melalui Ini: Mohawk Kedaulatan dan Negara Kanada.Majalah Briarpatch, Pp. 34, 36. Diakses di <http://briarpatchmagazine.com/articles/view/a-border-runs-through-it> pada 20 Mei 2017 15.44 WITA
- McMullin A. (2006,21 Juni). NCAI Wraps up Mid-tahun Konferensi; Resolusi perbatasan Disorot [Siaran Pers]. [http://www.ncai.org/NewsView.19.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[arc\]=1&tx](http://www.ncai.org/NewsView.19.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[arc]=1&tx)

_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[pS]=1149138000&tx_ttnews[tt_news]=175&
tx_ttnews[backPid]=18&Chash=4f38d5c464 diakses pada 20 Mei 2017 20.47
WITA.

Yani yanan Mochammad, Hak asasi manusia dan hubungan internasional, Di
akses dari
[http://repository.unpad.ac.id/4378/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_interna
sional.pdf](http://repository.unpad.ac.id/4378/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf) pada 20 Mei 2017 14.09 WITA